Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

Article

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD))

Harpinsyah^{1*}, Miranti^{2,} M. Hasyim Azhari³

Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo propinsi Jambi

* Corespondensi Penulis: harpinbanako@amail.com

Abstract: This research was conducted in several villages within the Air Hitam Subdistrict, selected due to their involvement and proximity to the subject matter. The study aims to gather comprehensive information and a clear depiction of the Jenang, particularly focusing on the role of the Jenang, and to present it in a series of descriptive sentences that can effectively convey the information to the broader public. What makes this research particularly interesting is that the Jenang is not a member of the Suku Anak Dalam (SAD) community but an ordinary person who holds the highest position within the SAD governance system and exercises autocratic power. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Informants include the Head of Air Hitam Subdistrict, the Jenang, the Temenggung, the Tengganai, village heads, and community leaders. Data were collected from various literatures, documents, and field research through observation and in-depth interviews. The Jenang plays a significant and far-reaching role in the governance system and everyday life of the Suku Anak Dalam. The Jenang holds multiple roles across various aspects of SAD life. In addition to serving as a leader or government authority, the Jenang is also regarded as a foster father to the Orang Rimba. As the holder of governmental power, the Jenang exercises autocratic authority—every member of the Suku Anak Dalam submits to and obeys the Jenang, whose decisions are final. Interestingly, the Jenang is not a descendant of the Suku Anak Dalam, but rather an outsider, often referred to as Orang Terang (non-SAD).

Keywords: Jenang, Governance, Suku Anak Dalam

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dibeberapa desa di wilayah Kecamatan Air Hitam, dengan pertimbangan keterlibatan dan kedekatan wilayah tersebut dengan tema yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mencari semua informasi atau gambaran jelas mengenai Jenang terutama mengenai peran Jenang dan mengemasnya dalam susunan kalimat-kalimat deskriptif yang mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah sosok Jenang itu merupakan orang biasa bukan orang Suku Anak Dalam, namun memegang kedudukan tertinggi dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam dan memiliki kekuasaan otokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sedangkan yang menjadi informan adalah Camat Air Hitam, Jenang, Temenggung, Tengganai, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, dokumen-dokumen dan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam. Peran Jenang Sistem Pemerintahan dan kehidupan Suku Anak Dalam sangat besar dan luas. Jenang memiliki berbagai peran ditiap-tiap pilar kehidupan Suku Anak Dalam. Selain berkedudukan sebagai pemimpin atau pemerintah, Jenang juga berkedudukan sebagai Bapak Angkat bagi orang rimba. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Jenang memiliki kekuasaan yang bersifat otokratis, semua Suku Anak Dalam tunduk dan patuh kepada Jenang, keputusan tertinggi ada ditangan Jenang, dan hal yang unik adalah Jenang itu bukan merupakan keturunan Suku Anak Dalam alias orang luar SAD atau Orang Terang.

Kata Kunci: Jenang, Pemerintahan, Suku Anak Dalam

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution- ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 26862271 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi,

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku ternyata memiliki budaya dan sistem pemerintahan tersendiri (Muchlis et al., 2025). Terutama suku-suku yang masih tinggal di wilayah-wilayah tertentu yang tidak bercampur langsung dengan masyarakat lainnya. Rata-rata sistem pemerintahan yang mereka gunakan hampir serupa dengan sistem monarki atau kerajaan yang bersifat otokratis dan beberapa diantaranya menerapkan sistem demokrasi, salah satu suku yang menerapkan sistem otokrasi adalah Suku Anak Dalam. Otokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan absolut yang dipegang oleh satu orang yang biasa disebut sebagai otokrat, segala keputusan dan kebijakan terkonsentrasi pada satu orang. Keberadaan otokrasi dalam sistem pemerintahan Suku Anak Dalam dibuktikan dengan keberadaan Jenang yang bertindak selayaknya seorang otokrat.

Suku Anak Dalam atau SAD merupakan salah satu suku yang masih terasing. Hampir keseluruhan bagian dari mereka masih tinggal di hutan dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Bagi mereka hutan bukan semata-mata bermakna ekonomis melainkan juga sosio budayareligius di mana mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hutan tersebut. Citra dari manusia bercorak sosio budaya-religius dalam alam pikiran Suku Anak Dalam tersebut melahirkan perilaku pengelolaan sumber daya hutan yang arif dan bertanggung jawab. Masyarakat SAD mendiami beberapa kampung dan hutan di daerah dataran rendah Provinsi Jambi seperti Kabupaten Sarolangun, Batang Hari, Bungo, Bangko dan Tebo. Sebagian besar bagian dari mereka yang masih hidup mengembara di hutan memenuhi kebutuhan mereka dengan berburu, meramu dan menangkap ikan. Sebagian kecil dari mereka sudah bisa dikatakan menetap dengan mata pencaharian berhuma, berburu, meramu, menangkap ikan dan memanfaatkan hasil hutan seperti damar dan rotan. Menurut sejarah lisan SAD merupakan orang malau (marga batak) sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam Taman Nasional Bukit Dua Belas. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Sejarah lain menyebutkan mereka berasal dari Pagaruyung Sumatera Barat yang mengungsi ke Jambi (I. Yanti et al., 2025).

Keberadaan SAD di Kecamatan Air Hitam dengan membawa dinamika kepemimpinan, perundang-undangan serta pola perilakunya tersendiri tentunya menciptakan beragam konflik horizontal dan vertikal. Sistem pemerintahan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat luar membuat mereka kerap kali terlibat berbagai gesekan dengan masyarakat luar bahkan dengan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ratri Novita, 2025). Hal ini terjadi karena adanya dualisme kepemimpinan antara ketemenggungan dan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adanya perbedaan cara pandang mereka terhadap lingkungan. Untuk itu, maka diperlukan sebuah jembatan yang mampu memfasilitasi kepentingan lintas kepemimpinan. Dalam struktur pemerintahan masyarakat SAD sendiri sebenarnya telah memiliki penghubung antara mereka dengan dunia luar, penghubung ini disebut sebagai Jenang. Jenang dalam pemerintahan SAD sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Adapun nama-nama Jenang dari awal kemunculannya hingga saat ini akan disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Nama Jenang 5/10 Dakit Data Delas		
No	Nama	Masa Hidup
1.	Abdul Latif/Selatih	Pertengahan masa penjajahan
		Belanda
2.	Baharudin	1916-1999
3.	Ismail Razak/Hasan	1967-2010
4.	Jalaludin	1980- sekarang

Tabel 1. Data Nama Jenang SAD Bukit Dua Belas

Sumber data : Hasil wawancara peneliti dengan Jenang Jalaludin diolah oleh peneliti

TINJAUAN PUSTAKA

Jenang

Jenang adalah salah satu jabatan dalam sistem pemerintahan Suku Anak Dalam, Jenang atau yang disebut juga sebagai Raja Jenang adalah seorang pimpinan Suku Anak Dalam (orang rimba) yang kedudukannya paling tinggi dalam sistem pemerintahan Suku Anak Dalam, Jenang memiliki kedudukan di atas Temenggung. Selain sebagai pemimpin, Jenang juga merupakan *"Bapak Angkat"*-nya orang Suku Anak Dalam (Orang Rimba). Tugas Jenang sebagai penghubung antara Suku Anak Dalam dengan Pemerintah. Posisi Jenang diwariskan berdasarkan garis keturunan orang tua (Mustika et al., 2025).

Jenang merupakan sebuah jabatan yang kompleks, selain sebagai penyambung lidah atau penghubung antara Suku Anak Dalam dengan orang luar (orang terang). Jenang juga berperan sebagai pengambil keputusan atau kebijakan tingkat tinggi (biasanya yang berkaitan dengan masyarakat luar atau pemerintahan) dan pendamping bagi orang rimba saat berhubungan dengan pemerintah terutama saat musyawarah atau sidang, serta menjadi tempat mengadu orang rimba mengenai keluh kesah kehidupannya (Suzeta, 2022).

Jenang sendiri merupakan jabatan yang unik, di mana Jenang sebenarnya adalah Orang Dusun atau Orang Terang (orang biasa yang bukan bagian dari Suku Anak Dalam) yang ditunjuk oleh perkumpulan Orang Rimba untuk menjadi Jenang atau Raja Jenang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan Suku Anak Dalam.

Pemerintah Dan Pemerintahan

Pemerintah adalah orang-orang atau lembaga yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah dan masyarakatnya. Berbekal kekuasaan tersebut, pemerintah berwenang membuat dan menjalankan berbagai macam pilar-pilar dalam pemerintahan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Kekuasaan pemerintah biasanya terbatas, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh batas batas jangkauan yang diatur dalam Undang-Undang. Batas-batas dalam pemerintahan biasanya meliputi batasan wilayah, batasan wewenang, waktu dan lain sebagainya. Kekuasaan pemerintah biasanya didapat dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya, pemberian amanat ini dalam sistem demokrasi bisa digambarkan dengan adanya prosesi pemilu. Amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah didasari oleh rasa percaya atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika pemerintah melanggar atau tidak mampu mengemban amanat dari rakyat, maka pemerintah tersebut biasanya bisa saja diturunkan, diberi mosi tidak percaya, bahkan bisa dikenakan sanksi perundang-undangan (Siswoyo et al., 2025).

Pemerintahan adalah sebuah sistem atau organinasi (pemerintah) yang tersusun atas

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

berbagai macam bagian-bagian atau lembaga khusus yang terintegrasi dalam satu wadah dengan visi global yang sama yang memiliki kewenangan dan kewajiban masing-masing di tiap-tiap bagian. Pemerintah adalah pelaku atau subjek yang menjadi dalang dalam sebuah sistem pemerintahan, pemerintah memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan, program-program, dan peraturan perundang-undangan (O. Yanti, 2025).

Istilah pemerintahan dapat kita bagi dalam empat pengertian:

- 1. Pemerintah mengacu kepada proses memerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
- 2. Istilah ini dapat pula dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.
- 3. Pemerintah acap kali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
- 4. Istilah ini dapat pula mengacu kepada bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Suku Anak Dalam (SAD)

Sumatra merupakan salah satu pulau di indonesia yang didiami oleh beberapa suku, diantaranya suku melayu, aceh, batak, minangkabau, karo, melayu serdang, melayu siak, melayu jambi, dan melayu palembang (Sastra Dinata, 2025). Selain itu terdapat juga suku minoritas yaitu Suku Anak Dalam atau Orang Rimba yang sering terabaikan dan jauh dari pengamatan pemerintah dan media. Hal tersebut dikarenakan akses yang sulit dan mereka tersebar di hutanhutan belantara, di sungai-sungai besar, dan jauh dari akses informasi modern. Sehingga kehidupan mereka terabaikan, baik dari sisi ekonomi, keagamaan, sosial, dan pendidikan. Selain itu, ada tiga penyebutan yang populer dalam penyebutan SAD. Pertama "KUBU" penyebutan kubu digunakan oleh suku melayu yang mengandung arti primitif, kotor, dan bodoh. Kedua "SUKU ANAK DALAM" penyebutan ini digunakan oleh pemerintah melalui departemen sosial, yang memiliki arti sekelompok orang terbelakang dan tinggal di pedalaman. Yang ketiga "ORANG RIMBA" penyebutan ini digunakan oleh sebagian kecil dari kelompok mereka sendiri. Makna penyebutan itu menunjukkan bahwa jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan kebudayaannya yang tidak lepas dari hutan (Putra & Amir, 2022).

Suku Anak Dalam (SAD) memiliki gaya hidup dan kepercayaan yang unik dan berbeda dari masyarakat modern, mereka menganggap hutan sebagai tempat tinggal mereka, dan mereka merupakan bagian dari hutan tersebut. SAD sangat menggantungkan hidup mereka pada hutan. oleh karena itu, mereka sangat melestarikan hutan. Mereka menganggap bahwa hutan adalah milik bersama, sehingga siapapun boleh memanfaatkannya. Suku anak dalam merupakan salah satu suku yang masih terasing, mereka sebagian besar masih tinggal di dalam hutan dan hanya segelintir saja yang sudah mulai menetap. Suku Anak Dalam memiliki kebiasaan hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Perpindahan suku anak dalam dari satu wilayah ke wilayah lainnya dilatarbelakangi oleh berbagai hal, mulai dari faktor ketersediaan makanan hingga kematian anggota keluarga atau yang biasa disebut dengan budaya *Melangun* (Nadya Thamariskha, 2022).

Kepemimpinan

Kepemimpinan (*leadership*) merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk "memimpin" atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Kata "kepemimpinan" berasal dari kata "pimpin", kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Kepemimpinan adalah tentang

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

bagaimana mempengaruhi orang lain agar bisa mengikuti kemauan pemimpin yang didasarkan pada suatu kepentingan (Setyabudi, 2022).

Kepemimpinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi, tanpa adanya kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan dalam diri seorang pemimpin maka akan sulit untuk menciptakan kondisi yang baik dalam sebuah organisasi, sehingga akan sulit tercapai tujuan suatu organisasi yang menjadi tujuan bersama (Anggraini, 2022),

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat seorang peneliti melakukan penelitiannya. Lokasi penelitian tidak bisa dipilih secara asal, melainkan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya kriteria-kriteria penentuan lokasi didasarkan pada keterkaitan lokasi terhadap masalah yang diangkat. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (MAHARANI, 2023).

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Pemukiman Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam. Alasan lokasi ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena Pemukiman Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam adalah lokasi yang ideal untuk memperoleh informasi terkait Bentuk Otokrasi Jenang dalam Pemerintahan Suku Anak Dalam. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan April 2024 yang berlokasi di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan ini dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai peran Jenang dalam pemerintahan Suku Anak Dalam dan mencari gambaran mengenai bentuk Otokrasi Jenang. Oleh karena itu, jenis penelitian ini dapat dikategorikan kedalam penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret Jenang yang sebenarnya ada di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*),

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*. Gabungan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang di aplikasikan meliputi :

- 1. Pengamatan (Observasi),
- 2. Wawancara (Interview),
- 3. Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenang Sebagai Nara Hubung Dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)

Jenang merupakan satu-satunya jabatan tambahan dalam sistem pemerintahan Suku Anak Dalam, yang diduduki oleh orang terang (bukan orang Suku Anak Dalam), dan kemunculannya bersifat menyusul jabatan internal sebelumnya, atau sebagai pelengkap yang digunakan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan saat itu, sekaligus sebagai penyempurna bagi sistem yang sudah ada sebelumnya.

Namun, peran yang paling menonjol dan sangat penting saat ini adalah peran Jenang sebagai narahubung dan resolusi konflik SAD, mengingat bahwa SAD masih tertinggal dan masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bisa memicu terjadinya perselisihan antara SAD dengan masyarakat luar serta pola pikir mereka yang masih cukup tertinggal, maka dari itu peran ini cukup dibutuhkan saat ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Sebagai kepala pemerintahan atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam, Jenang juga mengemban peran sebagai penghubung. Dari masa penjajahan hingga saat ini Jenang masih menjadi penghubung bagi setiap orang luar yang ingin berinteraksi dengan orang rimba, baik itu interaksi biasa, penelitian, pengabdian, penyaluran bantuan, dan lain sebagainya.

Wawancara dengan Bapak Jenang Jalaludin "...ada seloko orang rimba itu bunyinya betiti jalan ka rajo batanggo jalan ka jenang, yang bisa diartikan bahwa jenang itu merupakan penghubung...". Kedudukan Jenang sebagai penghubung ini rupanya juga dimanfaatkan oleh pemerintah dalam usaha menjangkau masyarakat Suku Anak Dalam, Jenang berperan sebagai jembatan yang mempermudah pendekatan dan memberi pengertian kepada Suku Anak Dalam agar dapat menerima dan memahami maksud dari pemerintah, karena kita tahu mereka cukup sensitif dan akan tidak baik apabila sampai terjadi kesalahpahaman.

Wawancara dengan Bapak Herjoni Edison "...keberadaan Jenang itu sangat membantu bagi kami, dengan adanya Jenang kami menjadi lebih nyaman ketika hendak berinteraksi dengan Suku Anak Dalam, ya kan kita sama-sama tahu mereka itu gimana, memang sebagian dari mereka sudah mudah untuk diajak komunikasi, mereka sudah lebih mudah untuk memahami maksud kita, tapi sebagian besar dari mereka masih belum maju, masih sulit untuk diajak komunikasi, masih takut-takut dengan orang luar, terutama yang didaerah hutan-hutan yang memang masih benar-benar hutan seperti diujung makekal, mereka tidak akan mau menerima kita kalau tidak didampingi oleh Jenang..."

Dapat kita lihat gambaran betapa besar pengaruh kehadiran Jenang di mata pemerintah. Pemerintah merasa sangat terbantu dengan kehadiran Jenang dengan berbagai perannya. Selain membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui fungsi Jenang sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat, Jenang juga membantu pemerintah dalam merealisasikan program-program dan agendanya, terutama yang menyangkut Suku Anak Dalam.

Dapat kita simpulkan bahwa peran Jenang sampai saat ini masih dibutuhkan, masih banyak

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

SAD yang sulit untuk diajak komunikasi dan pemikirannya masih belum maju, masih banyak oknum SAD yang nakal, dan ada beberapa kelompok masih sulit untuk dikondisikan apabila tidak ada peran Jenang di sana. Di Pematang Kabau sendiri itu sebenarnya masyarakat Suku Anak Dalamnya sudah mulai mengerti dan pemikirannya sudah mengarah ke pemikiran modern, tetapi tetap saja SAD tetap SAD, mereka masih memiliki sisi takut dengan dunia luar, masih sulit untuk dibina dan seringkali salah paham dengan niat atau maksud pemerintah.

Jenang Sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai sebuah jabatan yang kedudukannya paling tinggi di mata rantai sistem pemerintahan internal Suku Anak Dalam, maka Jenang –lah yang memegang peran sebagai kepala pemerintahan atau puncak dari sistem pemerintahan Suku Anak Dalam. Jenang memiliki kedudukan di atas Temenggung, segala sesuatu yang tidak mampu diputuskan oleh Temenggung, baik itu karena sifatnya yang terlalu luas atau besar maupun karena sensitivitas suatu perkara akan diambil alih oleh Jenang. Segala kebijakan Ketemenggungan akan selalu berdasarkan hukum adat dan arahan atau "titah Jenang".

Wawancara dengan Bapak Jenang Jalaludin "...Jenang itu kedudukannya tinggi dia ada di atas Temenggung, dulu waktu masa penjajahan, Jenang itu mirip sekali dengan kepala desa sekarang, sedangkan Temenggung-Temenggung waktu itu bisa dibilang sama seperti RT atau RW sekarang, setiap hal-hal yang bersifat luas yang mencakup kehidupan beberapa ketemenggungan dan hal-hal yang cukup rentan atau sensitif selalu dihandel langsung oleh Jenang, Jenang yang memerintahkan untuk gotong royong, Jenang yang berhak memutuskan untuk mengizinkan atau tidaknya Orang Rimba untuk bepergian atau berpindah tempat tinggal pada waktu itu, karena memang waktu itu kan keadaan tidak seperti sekarang, dulu penjajah di mana-mana, sedangkan Orang Rimba tidak begitu paham dengan kondisi diluar, yang lebih paham dan menguasai kondisi diluar itukan Jenang, jadi semua bergantung pada Jenang waktu itu."

Sebagai kepala pemerintahan, Jenang berhak untuk mengetahui dan menyaksikan pengangkatan atau pemberhentian pejabat di bawahnya, biasanya jika terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, misalnya pengangkatan pejabat baru, maka pemerintahan ketemenggungan harus melaporkannya kepada Jenang.

Wawancara dengan Bapak Jenang Jalaludin "..dalam mendalami peran sebagai kepala pemerintahan, Jenang berhak untuk tahu apa saja yang terjadi di dalam tubuh masyarakat yang dipimpinnya, karena apapun itu pasti akan berpengaruh untuk kehidupan mereka untuk keselamatan merek."

Dapat dibayangkan betapa besar usaha Jenang untuk melindungi masyarakatnya, wajar saja apabila pada saat itu Jenang harus tau segalanya, karena pada masa itu Jenang harus bisa dekat dan mampu menguasai masyarakatnya agar bisa memastikan masyarakatnya selalu dalam keadaan yang aman, kerentanan kondisi keamanan pada saat itu membuat Jenang harus bekerja ekstra untuk mencari informasi baik dari dalam Suku Anak Dalam maupun dari masyarakat terang agar bisa melihat pergerakan para penjajah serta mengantisipasi segala hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi.

Jenang Sebagai Kepala Adat

Selain menjabat sebagai kepala pemerintahan, Jenang juga merangkap menjadi kepala adat sekaligus, layaknya kepala desa saat ini yang juga menjadi kepala adat. di samping menjalankan pemerintahan, Jenang juga bertugas untuk memegang teguh serta menjalankan adat istiadat yang ada dalam kehidupan Suku Anak Dalam. Sebagai kepala adat, seringkali Jenang menengahi dan

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

memutuskan suatu perkara atau perselisihan yang tidak mampu diselesaikan oleh ketemenggungan (sebagai resolusi konflik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya), dapat disimpulkan bahwa Jenang bertugas menjadi pengadil tingkat akhir (dalam sistem pemerintahan adat Suku Anak Dalam). Dalam menengahi suatu perkara, Jenang berkiblat pada ketentuan hukum adat dalam mengambil keputusan.

Selain sebagai penengah, Jenang sebagai kepala adat juga berwenang untuk membuat perubahan pada hukum adat dengan persetujuan para Temenggung dan perwakilan orang rimba. Jenang juga memiliki kewenangan untuk mendengarkan, meneliti dan memutuskan perubahan pada hukum adat yang diajukan oleh pemerintah ketemenggungan dan orang rimba. Orang rimba berhak untuk merumuskan sebuah perubahan pada tubuh hukum adat, namun eksekutornya tetaplah Jenang.

Sudah tergambarkan betapa besar kekuasaan seorang Jenang selaku kepala adat. Jenang memiliki kewenangan untuk membuat suatu keputusan, dan keputusan Jenang bersifat wajib untuk dipatuhi serta diikuti oleh orang rimba berdasarkan hukum adat.

Perbedaan pengambilan keputusan Jenang pada masa penjajahan dengan masa sekarang terletak pada penerapan hukuman-hukuman berat. Jika ada kasus yang merujuk pada hukum berat pada masa sekarang, Jenang akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan rasa kemanusiaan dan menghargai Hak Asasi Manusia atau dapat dikatakan hukum adat untuk kelas yang bersinggungan dengan HAM serta hukum perundang-undangan maka pemutusannya tidak mutlak dengan hukum adat.

Dapat kita simpulkan bahwa hanya hukum-hukum yang terkesan tidak manusiawi saja yang diubah, seperti hukum sangkar (*kurungan*) dan sejenisnya, sedangkan untuk hukum-hukum yang masih ringan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta Hak Asasi Manusia tetap diterapkan sebagaimana mestinya. Sebenarnya pada dasar hukum adat yang asli, hukum-hukum berat itu tidak diubah, namun dalam pelaksanaannya diubah tanpa mempengaruhi hukum yang asli.

Jenang Sebagai Bapak Angkat

Selain menduduki jabatan politik sebagai pemimpin, Jenang juga memiliki status sosial sebagai Bapak Angkat-nya Suku Anak Dalam. Selain memiliki peran dibidang pemerintahan dan adat istiadat, Jenang juga memiliki peran penting yang lain yang lebih mengarah pada status kekeluargaan. Dari masa penjajahan hingga saat ini Jenang masih menjalankan perannya sebagai bapak angkat bagi orang rimba.

Dapat kita ketahui bahwa hingga saat ini Suku Anak Dalam masih menganggap Jenang sebagai Bapak-nya dan masih sering bercerita tentang keluh kesahnya serta meminta bantuan kepada Jenang saat menghadapi keadaan yang sulit. Begitupun dengan Jenang, ia masih melaksanakan tugasnya sebagai Bapaknya SAD dengan baik. Walaupun kita ketahui sudah ada orang-orang dari SAD yang hidupnya sudah maju dan layak, keadaan itu tidak membuatnya bisa lepas dari Jenang, sesekali masih ada dari kelompok yang sudah maju itu menemui Jenang dan bercerita kepada Jenang.

Wawancara dengan Bapak Jenang Jalaludin "Biarpun sebagian SAD itu sudah maju, tapi mereka tidak bisa lepas dari Jenang, kalau ketemu Jenang dia sering menangis sambil bercerita, salah satu orang dari SAD yang sudah maju bahkan dia itu sudah haji tapi kalau ketemu Jenang masih seperti anak ketemu dengan bapaknya itu Pak Tarib atau Haji Jaelani, dia sering itu nangisnangis kalau ketemu saya, kalau lewat sini dia selalu mampir, kalau lagi buru-buru paling dia ngabarin lewat telpon, apalagi kalau dia mau pergi jauh pasti dia bilang ke saya."

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

Kita bisa melihat gambaran betapa akrabnya seorang Jenang dengan SAD, bahkan ketika SAD tersebut hendak pergi jauh dia memberi kabar kepada Jenang, jika diperhatikan memang benar istilah Jenang sebagai Bapak Angkat ini, karena hubungan SAD dengan Jenang memang tampak bagaikan anak dan bapak.

Jenang Sebagai Pelindung

Masih berkaitan dengan kedudukannya sebagai pemimpin dengan kedudukan tertinggi di rantai sistem pemerintahan SAD serta kedudukannya sebagai bapak angkatnya SAD, Jenang memiliki peran yang masih berkaitan dengan peran-peran sebelumnya, yaitu sebagai Pelindung bagi Orang Rimba.

Sebagai pelindung, Jenang bertugas menjaga dan membela Suku Anak Dalam apabila diperlukan. Fungsi pelindung oleh Jenang bagi Suku Anak Dalam sebenarnya lebih diperlukan pada masa penjajahan, karena memang pada masa itu Suku Anak Dalam benar-benar membutuhkan pelindung yang mampu menjaga mereka dari penjajah. Namun, fungsi pelindung pada masa saat ini juga masih berlaku dan masih dijalankan oleh Jenang, dalam kondisi tertentu dan dengan pertimbangan tertentu.

Bapak Jalaludin selaku Jenang yang keempat mengatakan bahwa:

"Jaman dulu Jenang itu dipakai jadi pelindungnya orang rimba, terutama melindungi dari penjajah dan orang-orang terang yang nakal, sekarang pun Jenang itu masih jadi pelindung, tapi konteks melindungi di sini sedikit bergeser, kalau sekarang palingan Jenang jadi pelindung pas ada pertikaian antara orang rimba dengan orang dusun atau mungkin dengan PT, tapi tetap Jenang akan melihat kondisinya dulu, tidak asal-asalan melindungi, kalau salah ya salah kalau benar ya benar, biasanya Jenang itu merangkap, melindungi dan mendampingi SAD"

Dapat dimengerti bahwa fungsi pelindung dari Jenang itu sebenarnya bermula pada masa awal kemunculannya yaitu pada masa penjajahan. Namun begitu, fungsi pelindung dari Jenang saat ini masih ada dan masih diterapkan, hanya saja ada pergeseran konteks dan harus membaca situasinya terlebih dahulu, tidak asal membela dan melindungi Suku Anak Dalam.

Jenang Sebagai Pendamping

Masih berkaitan dengan peran-peran sebelumnya, peran Jenang sebagai pendamping sebenarnya masih turunan dari kedudukan Jenang sebagai pemimpin, bapak, dan pelindung Suku Anak Dalam. Jenang memiliki tugas untuk mendampingi SAD dalam suatu situasi, misal saat SAD terlibat gesekan atau konflik dengan orang terang atau PT, Jenang akan mendampingi dan membantu SAD serta menjadi penghubung komunikasi apabila dibutuhkan.

Dalam menjalankan tugas sebagai pendamping, peran Jenang dari zaman penjajahan hingga saat ini tidak berubah, hanya saja saat ini tugas Jenang sudah sedikit lebih ringan karena disisi pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada pendamping bagi SAD, pendamping yang disediakan oleh pemerintah ini dinamakan dengan Pendamping Komunitas Adat Tertinggal atau yang biasa dikenal sebagai KAT. Di Kecamatan Air Hitam, KAT berada di bawah naungan pemerintah kecamatan, pada tahun 2023 lalu KAT di Air Hitam terdiri atas lima orang dan salah satu diantaranya adalah Jenang itu sendiri.

Sebenarnya peran Jenang itu masih saling berkaitan antara satu peran dengan peran yang lainnya. Hanya saja berbeda dalam konteks dan bentuk kejadiannya, secara umum Jenang adalah pemimpin dan pendamping bagi SAD. Contoh peran jenang dari berbagai peran-peran Jenang di atas yang cukup banyak dan kompleks tentunya terdapat banyak pula contoh nyata dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan melibatkan peran serta dari Jenang. Di sini kita akan membahas beberapa diantaranya saja yang dirasa cukup untuk melengkapi gambaran peran dari seorang

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

Jenang.

Kasus Konflik Antara SAD dengan PT PKM

Pada bulan Oktober 2021 terjadi sebuah peristiwa yang cukup menegangkan antara masyarakat SAD dengan pihak keamanan atau satpam PT Primatama Kreasi Mas (PKM), yang juga masih merupakan anak dari PT Sinarmas. Konflik itu bermula dari kasus pencurian buah kelapa sawit oleh oknum SAD, saat itu terjadi adu mulut dan pada akhirnya membuat oknum SAD itu tersinggung oleh kata-kata dan perlakuan dari satpam tersebut. Karena tidak terima dan masih kesal, pada akhirnya dua oknum SAD melakukan penembakan kepada satpam yang terlibat perselisihan dengannya tersebut.

Dengan Temenggung Nggrip selaku salah satu pimpinan SAD di daerah Makekal mengatakan bahwa:

"...ada banyak kejadian yang melibatkan SAD dengan orang PT, tapi yang banyak tersebar yang banyak orang tau itu ada beberapa, salah satunya itu yang tenar di tahun 2021, ada oknum SAD dari Kelompok Makekal yang kesal dengan omongan dan perlakuan satpam PT Sinarmas, sebenarnya waktu itu yang salah oknum kita, dia mencuri sawit PT soalnya, tapi karena memang waktu itu perlakuan dan omongan dari satpam itu sedikit kelewatan jadi kawan kita ini tersinggung, dia tersinggung dan tidak terima akhirnya terjadilah penembakan itu..."

Wawancara dengan Bapak Jenang Jalaludin, "...sebenarnya jika kita pahami, jika kita pelajari, penembakan itu dimaksudkan untuk memperingatkan satpam itu agar tidak kelewatan saat menegur mereka, karena memang satpam PT Sinarmas itu agak kasar dan terkadang berlebihan, pelakunya itukan oknum SAD tapi terkadang yang mereka caci itu SAD bukan khusus tertuju pada oknum itu, sehingga mereka merasa itu merugikan kelompok mereka, makanya mereka nekat, jika dilihat mereka itu memang sengaja mengincar kaki, bukan niat membunuh, waktu itu ada dua kali tembakan, tembakan yang pertama itu tembakan dengan memakai peluru tunggal, dan yang kedua itu memakai peluru tabur, yang efeknya agak ngeri ya yang peluru tunggal itu karena bisa meretakkan bahkan bisa mematakan tulang..."

Dari dua kesaksian tersebut dapat kita pahami bahwa memang yang salah itu oknum SAD, mereka mencuri buah sawit di kebun PT Sinarmas. Namun, karena komunikasi yang buruk akhirnya membesar dan menimbulkan ketersinggungan di pihak oknum SAD. Perlawanan yang dilakukan oknum SAD itu pun juga diniatkan untuk menciderai saja tidak sampai membunuh.

Dapat kita ketahui bahwa oknum SAD ini ternyata juga merasa takut, sehingga membuat kasus ini cukup rumit pada saat itu, karena oknum SAD yang terlibat tidak mau mengaku dan menyembunyikan senjata yang dipakainya. Setelah sampai di tangan Jenang, Jenang menelusuri dan menemukan pelaku tapi tidak dengan barang buktinya, dengan kehalusan dan kuasa Jenang akhirnya oknum tersebut mau mengaku dan akhirnya kasus itu dapat segera diselesaikan.

Dalam kasus ini, selain Jenang berperan sebagai media pendekatan Jenang juga berperan sebagai pendamping saat sidang dilaksanakan dan menjadi pihak yang ikut meminta keringanan hukuman. Tentunya saat melaksanakan tugasnya tersebut Jenang juga mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari kesalahan dari oknum SAD hingga mempertimbangkan kondisi mental dari oknum tersebut.

Kasus Pencemaran Nama Baik SAD Oleh Oknum Satpam PT SINARMAS

Kasus pencemaran nama baik ini dipicu oleh pencurian buah kelapa sawit oleh SAD yang berasal dari luar wilayah Air Hitam, yaitu oknum SAD dari Singkut. Oknum tersebut melakukan pencurian di wilayah kebun PT Sinarmas, kasus pencurian itu terlihat dengan jelas, ada banyak video dan foto yang menunjukkan adanya oknum SAD yang melakukan pencurian. Namun, dalam

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

video tersebut terlihat dengan jelas bahwa pelakunya merupakan oknum SAD dari wilayah Singkut.

Dalam unggahan di akun tiktoknya, satpam tersebut menuliskan "wahai SAD, maling saja kerjamu" sebagai judul dari unggahan tersebut. Dalam akun tiktoknya terdapat cukup banyak video dan foto yang menunjukkan aktivitas pencurian oleh oknum SAD. Akibat dari penulisan judul yang mengatasnamakan SAD tersebut akhirnya membuat SAD tidak terima dan menuntut ganti rugi kepada pihak perussahaan. Mereka merasa dirugikan karena nama baik Suku nya dicemarkan oleh oknum satpam. Mereka beranggapan bahwa yang mencuri itu hanyalah oknum, bukanlah SAD secara luas dan kebetulan pelakunya SAD yang berasal dari luar.

Wawancara dengan Herjoni Edison "...kasus terbaru yang masuk di kecamatan itu ada kasus akun tiktok, jadi ada oknum satpam yang membuat akun tiktok khusus yang isinya tentang video dan foto pencurian buah sawit oleh oknum SAD dari Singkut, kebetulan pelakunya SAD dari luar bukan dari Air Hitam, SAD yang di sini akhirnya tidak terima dan menuntuk perusahaan, waktu itu di sini mereka menuntut ganti rugi sebesar 75M, kita sama-sama tahu lah kalau mereka mengeluarkan tuntutan pasti selalu besar, untungnya di sini kita dibantu Jenang, waktu itu hukum dikembalikan ke hukum adat, berdasarkan hukum adat Suku Anak Dalam di Air Hitam, kasus pencemaran nama baik itu hukumannya berupa denda, dendanya kemarin itu sebanyak 60 lembar kain atau senilai Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), dengan putusan Jenang itu akhirnya SAD menerima dan pihak satpam tidak merasa keberatan, akhirnya selesailah kasus itu di kantor ini dengan perantara Jenang."

Pernyataan Herjoni Edison, selaku Camat Air hitam tersebut dapat kita pahami bahwa keberadaan Jenang dalam menengahi kasus itu cukup besar pengaruhnya. Jenang dinilai bijak saat mengambil keputusan, keputusannya mampu membuat pihak SAD menerima dan pihak satpam tidak merasa keberatan. Selain itu, melihat besarnya tuntutan dan denda akhir yang dijatuhkan serta sikap menerima dari pihak SAD sudah cukup menggambarkan betapa besar kuasa Jenang bagi SAD, mereka patuh dan menerima segala keputusan Jenang. Memang dalam prosesnya ada beberapa SAD yang berusaha memberikan argumennya, namun setelah Jenang mengembalikan hukum ke hukum adat yang ada, mereka akhirnya menerima dan bersedia berdamai dengan satpam terkait.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Peran dan Fungsi Jenang dalam Sistem Pemerintahan SAD cukup banyak dan penting, didalam kehidupan SAD Jenang berperan sebagai :
 - a. Kepala Pemerintahan
 - b. Kepala Adat
 - c. Penghubung
 - d. Bapak Angkat
 - e. Pelindung
 - f. Pendamping

Secara garis besar itulah poin-poin dari peran atau kedudukan Jenang dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat SAD, jika dijabarkan tugas atau peran Jenang sangatlah banyak, karena Jenang memang memiliki berbagai tugas yang ada pada hampir tiap-

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

tiap bagian kehidupan dari masyarakat SAD.

- 2. Otokrasi Jenang dalam Sistem Pemerintahan SAD, Jenang bertindak selayaknya seorang otokrat dalam pemerintahan SAD dibuktikan dengan kekuasaan dan kewenangan Jenang yang memenuhi kriteria atau ciri-ciri pemerintahan otokratis. Jenang memiliki kekuasaan dan keputusan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipengaruhi oleh mekanisme kontrol rakyat. Keputusan dan kebijakan Jenang didasarkan pada kepentingan bersama dan hukum adat yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat SAD termasuk Temenggung dan Tengganai.
- 3. Hambatan Jenang dalam Mengurus SAD sebenarnya cukup banyak, namun hambatan yang paling berpengaruh yaitu:
 - a. Pola pikir masyarakat SAD yang mayoritas masih tertinggal
 - b. Kondisi ekonomi masyarakat SAD secara umum yang masih di bawah garis kemiskinan
 - c. Tingkat pendidikan yang rendah dan angka buta huruf yang tinggi
 - d. Banyaknya oknum-oknum masyarakat SAD yang nakal

Saran

- 1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk bisa memfasilitasi atau memberi kepastian kepada Jenang dengan memberi SK kepada Jenang atau memberinya insentif atau bisa mengaktifkan kembali pendamping KAT, karena dalam menjalankan tugas sebagai penghubung dan resolusi konflik tidaklah mudah dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kita ketahui bahwa pada saat ini Jenang itu tidak digaji.
- 2. Diharapkan kedepannya pemerintahan adat SAD bisa lebih baik, pemerintahan otokratis sebaiknya beralih ke sistem demokratis yang memungkinkan adanya masukan dari SAD kepada Jenang, perubahan ini juga harus diikuti dengan kesadaran SAD agar mereka mau ikut berpartisipasi dan mematuhi aturan yang telah disepakati agar konflik antara SAD dengan masyarakat luar atau pihak perusahaan bisa berkurang.
- 3. Mengingat bahwa hambatan terbesar dan merupakan sumber dari sebagian besar masalah SAD adalah mengenai ketertinggalan pola pikir SAD, maka seharusnya semua pihak yang memiliki kewenangan dan memiliki kesempatan bisa ikut serta membangun pola pikir masyarakat SAD, baik melalui pendidikan formal di sekolah, pelatihan atau penyuluhan oleh lembaga atau pemerintah atau organisasi masyarakat, dan pendekatan melalui komunikasi non formal sehari-hari agar mereka bisa lebih baik, lebih teratur, lebih mandiri dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D. (2022). Analisis pelayanan administrasi kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam [Skripsi, Universitas Jambi].

Budiardjo, M. (2002). Dasar-dasar ilmu politik. PT Gramedia Pustaka Utama.

Indeska, I., Putra, I., & Miko, A. (2021). Penolakan komunitas lokal terhadap kedatangan transmigran Suku Anak Dalam. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 32*.

Kabar Sarolangun. (2022, Maret 23). Pertumbuhan ekonomi Sarolangun tahun 2021 capai 6,61 persen. https://kabarsarolangun.com/pertumbuhan-ekonomi-sarolangun-tahun-2021-capai-661-persen/

- MAHARANI, D. W. I. (2023). *Upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Muchlis, F., Elwamendri, E., Sardi, I., Fathoni, Z., & Jamil, A. S. (2025). Sustainable livelihoods for Suku Anak Dalam: Integrating local wisdom and natural resources. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, *9*(1), 238–252.
- Mustika, D., Yaswirman, Y., Warman, K., & Yasniwati, Y. (2025). Wives with the double burden: Measuring gender justice in the division of joint property of Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan viewed from the principle of al-Musāwah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10*(1),

Peran Jenang Dalam Sistem Pemerintahan Suku Anak Dalam (SAD) Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus: Jenang Sebagai Nara Hubung dan Resolusi Konflik Suku Anak Dalam (SAD)) Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 103-115

407-428.

- Nadya Thamariskha, N. T. (2022). Penerapan asas persamaan di hadapan hukum (Equality before the law) terhadap pelaku tindak pidana umum Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah hukum Polres Sarolangun [Skripsi, Universitas Batanghari].
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun. (2020, Maret 20). Geografis Sarolangun. https://old.sarolangunkab.go.id/utama/statis-11-geografis-sarolangun.html
- Pito, T. A. (2006). Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi. Nuansa.
- Putra, A. A., & Amir, L. (2022). Kebijakan hukum Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Suku Anak Dalam. *Mendapo: Journal of Administrative Law, 3*(2), 70–83.
- Rapsanjani. (2023). *Analisis gender pada pasangan suami istri Suku Anak Dalam* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Ratri Novita, L. (2025). *Peran ganda perempuan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Repository. (2023, Januari 25). Landasan teori. Diakses 13 Januari 2024, pukul 13.00 WIB, dari www.repository.radenfatah.ac.id
- Sastra Dinata, M. (2025). Peran kepemimpinan Temenggung Suku Anak Dalam pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Batanghari 2024 (Studi kasus Kecamatan Batin XXIV Provinsi Jambi) [Skripsi, Universitas Jambi].
- Setyabudi, M. N. P. (2022). Minoritas kepercayaan Suku Anak Dalam: Perspektif toleransi dan keadilan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7*(2), 151–167.
- Siswoyo, S., Soleh, A., Susilawati, E., Kurniawan, H., & Rahayu, Y. (2025). Model dan strategi inklusi budaya Suku Anak Dalam di era modern di Provinsi Jambi. *Journal Development, 13*(1), 45–61.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supardan, D. (2013). Pengantar ilmu sosial. Bumi Aksara.
- Suzeta, R. (2022). Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan perubahan sistem mata pencaharian Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun [Skripsi, Universitas Jambi].
- Wikipedia. (2024, Januari 26). Kabupaten Sarolangun. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Sarolangun
- Wikipedia. (2024, Februari 26). Kepemimpinan. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan
 Wikipedia. (2023, Desember 30). Air Hitam, Sarolangun. https://id.wikipedia.org/wiki/Air Hitam, Sarolangun
- Yanti, I., Yuliatin, Y., Mahmudah, S., Mahluddin, M., & Larasati, Y. G. (2025). Negotiating Sharīʻah and customary law: Legal pluralism in familial relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi. *Journal of Islamic Law*, 6(2), 177–205.
- Yanti, O. (2025). Pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan: Studi Suku Anak Dalam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2*(1), 202–220.
- Badan Pusat Statistik Sarolangun. (2024a). Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun menurut kecamatan (Jiwa), 2018–2020. https://sarolangunkab.bps.go.id/indicator/12/62/1/jumlah-penduduk-sarolangun-menurut-kecamatan.html
- Badan Pusat Statistik Sarolangun. (2024b). Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun menurut jenis kelamin (Jiwa), 2021–2023. https://sarolangunkab.bps.go.id/indicator/12/52/1/jumlah-penduduk-kabupaten-sarolangun-menurut-jenis-kelamin.htm
- Badan Pusat Statistik. (2023, September 26). *Kecamatan Air Hitam dalam angka 2023*. https://sarolangunkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/2d18d5ef9e99c762582cac2c/kecamatan-air-hitam-dalam-angka-2023.html